

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum terjadi revolusi pada tahun 1979, Iran merupakan negara yang dihipit oleh dua kekuatan raksasa (*super power*) yaitu Rusia dan Inggris. Bahkan Iran menjadi negara yang berdaulat semu yang dibagi menjadi dua wilayah pengaruh (*sphere of influence*), masing-masing di bawah Rusia dan Inggris.¹ Namun setelah terjadinya Revolusi Islam Iran dan keruntuhan era Shah, Iran kemudian bertransformasi menjadi kekuatan baru di Timur Tengah.

Status Iran yang kemudian banyak berseberangan dengan kebijakan dan pandangan-pandangan Barat menjadikan Iran diposisikan sebagai negara yang perlu dimusuhi (*hostile*). Suara-suara keras yang sering dilontarkan Iran berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kapitalistik dan liberalistik Barat yang hegemonik menjadikan Iran dimasukkan ke dalam kelompok negara-negara yang diklaim tidak sejalan dengan arus gelombang zaman. Iran dituduh tidak demokratis, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, serta tidak menghargai hak-hak perempuan.

Dimasukkannya Iran ke dalam negara Poros Setan (*Axis of Evil*) semakin mengukuhkan kesenjangan hubungan antara Iran dengan Barat. Maka dengan kepemilikan dan pengembangan teknologi nuklir oleh Iran dianggap ancaman oleh Barat serta menimbulkan banyak reaksi negatif dari Barat, terutama Amerika Serikat. Bersama dengan Korea Utara, Iran didesak oleh

¹ Surwandono, *Syi'ah dan Gejala Demokratisasi*, Diktat MDI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001, hal 5.

negara-negara Barat untuk menghentikan pengembangan uranium di negaranya.

Tekanan negara-negara Barat dimulai semenjak Iran mendeklarasikan kemampuannya memperkaya uranium pada tanggal 11 Februari 2003 dibawah pemerintahan Presiden Khatami.² Tekanan tersebut sampai ke penerus Khatami, yaitu Mahmud Ahmadinejad yang pada tahun 2006, menggemakan kembali aroma revolusi di tengah tekanan Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran.³

Iran pada tanggal 4 Februari 2005 mengeluarkan pernyataan bahwa bahwa jikalau IAEA menyerahkan permasalahan ini kepada Dewan Keamanan, maka tindakan tersebut akan memberhentikan IAEA untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut maupun mengikuti perkembangan dari program pengayaan uranium Iran.

Kelima negara anggota tetap PBB – Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina melakukan pertemuan darurat pada tanggal 16 Januari 2006 dan hasil pertemuan tersebut meminta agar Iran dapat meyakinkan dunia bahwa program pengayaan uranium yang dikembangkannya itu benar-benar ditujukan untuk tujuan yang damai. Meskipun demikian, di dalam pertemuan tersebut, Uni Eropa tetap memberikan rekomendasi kepada PBB bahwa krisis Iran ini sebaiknya dipercayakan kepada Dewan Keamanan. Pada tanggal 4 Februari 2006, IAEA memutuskan untuk menyerahkan Krisis Nuklir Iran kepada Dewan Keamanan. Dua puluh tujuh negara, memberikan suaranya

² <http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Numbers/nr201-250.shtml>

³ Ammar Fauzi Heryadi, “Kekuatan Nuklir Rakyat; Iran Tidak Bisa Digertak”, diakses pada tanggal 1 Oktober 2009, tersedia dalam <http://islamalternatif.net/id/index.php?topic=Kolom>

terhadap resolusi yang pada intinya menyatakan untuk menyerahkan isu Iran kepada Dewan Keamanan. Tiga negara, yaitu Kuba, Syiria, dan Venezuela, memberikan suara untuk menolak resolusi tersebut. Sedangkan Indonesia, Algeria, Belarus, Libya dan South Africa memberikan suara abstain. Setelah keluarnya keputusan tersebut, Iran tetap bertahan pada pendiriannya dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi terhadap program pengayaan uraniumnya dengan Amerika ataupun negara-negara barat lainnya. Pernyataan ini kemudian diulangi kembali oleh Presiden Iran pada tanggal 10 April 2006.

Iran menolak mentah-mentah pemeriksaan pengayaan uranium mereka oleh lembaga internasional atau negara lain. Sikap keras kepala yang ditunjukkan Teheran tadi membuat Amerika Serikat-sebagai negara adidaya di bidang persenjataan nuklir-menetapkan tenggat waktu akhir September 2009 kepada Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium. Alasan Washington karena program tersebut akan mengarahkan Iran untuk membuat persenjataan nuklir. Penetapan batas waktu tersebut didukung oleh empat negara pemilik hak veto PBB lainnya yakni Inggris, Prancis, Rusia dan China. Di luar negara pemegang hak veto, Jerman mendukung tekanan terhadap Iran. Keenam negara besar itu menyatakan Iran harus menerima tawaran berunding terkait perdagangan jika pengayaan nuklirnya dihentikan.⁴

Perubahan kebijakan Iran setelah perundingan dengan G-5 + 1 (lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman) di Jenewa pada 1 Oktober 2009 menghasilkan kesepakatan yang berupa kesediaan Iran

⁴ Muhamad Najib, "Ketidakadilan AS di Timur Tengah" diakses pada tanggal 1 Oktober 2009, tersedia dalam <http://islamalternatif.net/id/index.php?topic=Kolom>

untuk mengirim sebagian uranium yang diperkaya miliknya untuk diproses di luar negeri tersebut serta bersedia fasilitas nuklirnya diperiksa IAEA cukup kontroversial karena selama ini kebijakan politik luar negeri Iran yang keras dan tanpa kompromi terkait teknologi nuklir.

Maka dalam hal ini, penelitian ini mengambil judul "PERUBAHAN SIKAP IRAN DALAM PROYEK NUKLIR DI BAWAH TEKANAN NEGARA-NEGARA BARAT" dengan memperhatikan fakta bahwa selama ini Iran tidak mau berunding dan mengizinkan pemeriksaan terhadap proyek nuklir dan pada akhir September 2009 yang menjadi deadline enam negara besar, Iran akhirnya merubah sikapnya. Negara tersebut bersedia berunding di Jenewa untuk membahas pengembangan rekayasa nuklir dan mengizinkan PBB untuk memeriksa reaktor nuklir yang mereka kembangkan, serta memproduksi uraian di luar negara negara Iran.

B. Pokok Permasalahan

Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perubahan sikap Iran dari non kompromis menjadi lunak dalam pengembangan nuklirnya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor perubahan sikap Iran terhadap proyek nuklir Iran di bawah tekanan negara-negara Barat.
2. Mengkaji secara garis besar mengenai program nuklir Iran dalam konteks internasional.

3. Secara teoritis maupun metodologis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya dan Studi Timur Tengah pada khususnya.

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Untuk menjelaskan faktor-faktor perubahan sikap Iran dalam proyek nuklir di bawah tekanan negara-negara barat, titik berat penulis pada tingkat politik luar negeri Iran dalam pencapaian tujuan nasionalnya. Untuk memperjelas hal tersebut, penulis menggunakan *Decision making theory*.

Decision making adalah tindakan memilih alternative yang tersedia dimana terdapat adanya suatu ketidakpastian. Di dalam politik luar negeri biasanya kurang dikenal, jarang terdapat alternatif kebijakan yang sudah pasti. Pembuatan keputusan juga bisa dikatakan sebagai sekedar pilihan abstrak sampai alternatif yang paling mungkin biasa digunakan kepada sebuah proses bertahap yang mengandung pilihan atas satu dengan yang lain dan kompromi diantara persaingan kepentingan organisasi dan tekanan birokratik.⁵

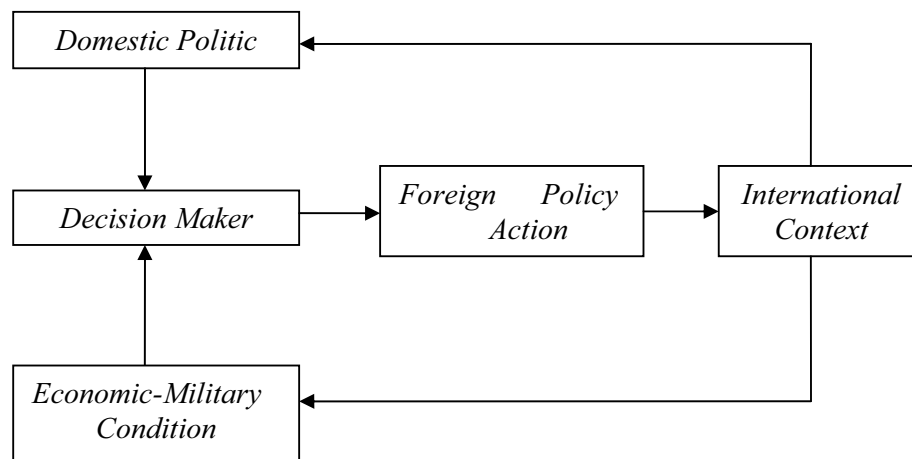
Menurut William D. Coplin dalam teori pembuat keputusan (*Decision Making Proses*)⁶ yang mengatakan bahwa apabila kita menganalisa kebijakan luar negeri suatu Negara, maka kita harus mempertanyakan peran dari pemimpin Negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika

⁵ James E. Dougherty, Robert : L. Pfaltgraff, Jr, *Decision Making Theories*, terjemahan Harwanto dahlan, Fisipol UMY, Yogyakarta, 1994., hal. 2.

⁶ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*, CV Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.

menganggap bahwa para pemimpin Negara (pembuat keputusan) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dianggap sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi pembuat keputusan. Yang pertama adalah kondisi politik di Negara tersebut termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di Negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional atau situasi di Negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk lebih memperjelas mengenai proses pengambilan keputusan, berikut ini dapat digambarkan dalam skema proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin.

**Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri
(menurut William D. Coplin)**



Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional,
Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan mengapa Iran merubah sikapnya dalam program nuklir akibat tekanan dari negara-negara Barat.

Dimana tiga hal yakni politik dalam negeri, keadaan ekonomi dan militer, serta konteks internasional sangat berpengaruh terhadap pembuat keputusan dalam menentukan kepentingan nasionalnya.

1. Politik dalam negeri

Menurut Coplin yang melatarbelakangi pembuatan keputusan luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri di negara tersebut. Termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik di negara tersebut.

Melihat dari penjelasan tersebut, politik dalam negeri Iran pada dasarnya memiliki prinsip bahwa segala bentuk kepentingan nasionalnya merupakan awal terbentuknya kebijakan luar negeri. Dalam kata lain, kebutuhan domestik bisa menjadi isu dalam menentukan kebijakan luar negerinya.

Faktor budaya dapat dilihat dari sikap Iran yang nonkompromistis dan tegas dalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap negara-negara yang dikategorikan penindas, hegemonis dan intervensionis.

Mengamati situasi dalam negeri, banyak unsur dari berbagai lapisan masyarakat di Iran yang menyambut sikap keras pemerintah, seolah semakin keras sikap para elite akan lebih menghibur mereka. Bahkan Hojjatul Islam Hasan Rouhani, sekjen terdahulu Majelis Keamanan Nasional sekaligus selaku ketua tim perundingan mengingatkan dalam jumpa pers, bahwa program nuklir adalah cita-cita bangsa, dan siapa pun presiden terpilih dalam pemilu mendatang dan menarik mundur program ini, pada saat itu juga ia akan jatuh.⁷

⁷ Ammar Fauzi Heryadi, "Kekuatan Nuklir Rakyat; Iran Tidak Bisa Digertak", diakses pada tanggal 1 Oktober 2009, tersedia dalam <http://islamalternatif.net/id/index.php?topic=Kolom>

Republik Islam Iran telah memilih jalan yang logis dan jelas dalam upaya memanfaatkan teknologi nuklir demi perkembangan dan kemajuan. Pemerintah Republik Islam Iran telah bersikukuh mempertahankan hak bangsanya untuk mengaplikasikan teknologi ini, dan tidak akan pernah mundur dari pendirian prinsipal dan legalnya di depan segala ancaman dan tekanan kekuatan-kekuatan besar dunia.⁸

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

a. Ekonomi

Kemampuan ekonomi yang dimiliki Republik Islam Iran sangat mendukung terwujudnya program pengembangan teknologi nuklir. Pada visi 20 tahun ke depan, Iran telah memproyeksikan 20 reaktor nuklir. Dan dalam RAPBN tahun 2007 yang diajukan, pemerintah telah mengalokasikan 1 miliar dolar untuk pengadaan dua reaktor secara bertahap.⁹ Kebijakan pemerintah Iran sebelumnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi awal penampilan barunya di level internasional. Majalah terkemuka 'Science' dalam sebuah artikel berjudul "Science in Iran: An Islamic Science Revolution?" mengungkapkan pencapaian sains Iran yang mengejutkan Barat lantaran dukungan anggarannya yang miskin.

Ini menjadi lebih krusial bila dikaitkan dengan sektor migas Iran.

Tahun 2006, ekspor minyaknya meningkat sampai 4 juta barel perhari.

⁸ "Keteguhan Sikap Nuklir Iran di Tengah Heboh Korut", diakses pada tanggal 1 Oktober 2009, tersedia dalam <http://www.komunitasmuslim.com>

⁹ Ammar Fauzi Heryadi, "Kekuatan Nuklir Rakyat; Iran Tidak Bisa Digertak", diakses pada tanggal 1 Desember 2007, tersedia dalam <http://islamalternatif.net/id/index.php?topic=Kolom>

Dan telah dilakukan investasi Jepang dalam proyek sumur minyak terbesar di Iran dalam 30 tahun terakhir, sementara Cina begitu berminat memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya dari Iran dalam jangka panjang. *USA Today* edisi 12 Januari 2006 mengamati bahwa jika negara-negara Eropa menghentikan ekspor komoditas mereka ke Iran, ekonomi Iran akan lebih mengalami kerugian daripada resiko perusahaan-perusahaan Eropa. Namun, merujuk pada pengalaman dan program ekonomi Iran yang dicanangkan, tidak dapat diharapkan Iran akan terganggu oleh tekanan embargo yang dilancarkan oleh Barat.¹⁰

Pada beberapa tahun terakhir ini, pendapatan tinggi Iran dari sektor migas membuat cadangan devisa luar negeri menjamin resistensinya terhadap dampak-dampak embargo ekonomi. Menurut laporan IMF, cadangan devisa Iran sampai akhir Maret 2005 mencapai 33/6 miliar dolar, dan diperkirakan pada Maret 2006 akan menembus angka 44 miliar dolar. Oleh karena itu, sulit dipastikan sanksi embargo ekonomi sebagai opsi bila ternyata Amerika dan Uni Eropa berhasil mengajukan Program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Lebih lagi indikasi melonjaknya tinggi harga minyak di World Street adalah sebuah indikasi buruk dari ancaman pengajuan oleh Amerika yang semakin keras. Bila keadaan ini berlanjut, harga minyak akan terus naik, maka dapat menyeret program nuklir Iran ke Dewan Keamanan dan apabila sanksi embargo dilakukan maka akan merugikan perekonomian Iran.

¹⁰ *Ibid*

b. Militer

Realitas ekonomi Iran di atas mungkin berbeda jika dibandingkan dengan kekuatan militernya. Kendati lembaga pengembangan militer ‘Sepoh’ dan ‘Artesh’ telah berhasil membuat rudal jarak jauh Syahab dan Tundar hingga menjangkau Israel, atau mengaplikasikan nanoteknologi pada sistem pertahanan negara, jelas keberhasilan ini tidak begitu berarti ditimbang oleh kecanggihan teknologi persenjataan dan sistem pertahanan musuh-musuh Iran.¹¹

Mengingat pengalaman perang Irak-Iran selama delapan tahun, Republik Islam Iran berupaya meningkatkan kemampuan pertahanannya berdasarkan kebutuhan pertahanan konvensional. Tak diragukan lagi, uji coba rudal Shahab 3 dan rudal Sijjil dari darat ke darat dengan bahan bakar padat merupakan bagian dari program peningkatan pertahanan negara ini. Kesuksesan uji coba rudal tersebut yang merupakan hasil karya anak negeri, dapat dikatakan sebagai tidak berpengaruhnya embargo pada negara ini. Melalui manuver militer tersebut, Iran menunjukkan bahwa dirinya dapat mandiri tanpa bergantung pada negara lain di bidang pertahanan. Ini merupakan fenomena yang tak dapat dipungkiri musuh-musuh negara ini.

¹¹ Ammar Fauzi Heryadi, “Kekuatan Nuklir Rakyat; Iran Tidak Bisa Digertak”, diakses pada tanggal 1 Oktober 2009, tersedia dalam <http://islamalternatif.net/id/index.php?topic=Kolom>

3. Konteks Internasional

Amerika selama ini mengklaim bahwa program pengayaan uranium Iran adalah untuk memproduksi bom atom, namun Iran menyangkal dengan tegas hal tersebut dan menyatakan bahwa program tersebut digunakan untuk pengembangan tenaga listrik.

Perundingan antara Iran dengan G-5 + 1 (lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman) di Jenewa pada 1 Oktober 2009 menghasilkan kesepakatan yang berupa kesediaan Iran untuk mengirim sebagian uranium yang diperkaya miliknya untuk diproses di luar negeri tersebut. Iran juga bersedia fasilitas nuklirnya diperiksa IAEA.

Negara-negara Kelompok Delapan (G8) mendesak Korea Utara dan Iran untuk membatasi program nuklir dan senjata pembunuh massalnya karena dianggap mengancam stabilitas dunia. Banyaknya senjata nuklir, biologi dan kimia seperti halnya terorisme merupakan ancaman yang istimewa bagi keamanan internasional.¹²

Pernyataan negara-negara G8 tersebut juga menyerukan agar komunitas internasional melakukan inspeksi senjata, kontrol ekspor dan jika perlu menggunakan cara-cara berdasarkan hukum internasional untuk menangkal ancaman ini termasuk penggunaan kekuatan. “Kami sangat mendesak Korea Utara melihat, membuktikan dan tidak menjalankan program nuklirnya kembali. Kami juga tidak akan mengabaikan perkembangan implikasi program nuklir Iran,” bunyi pernyataan tersebut.¹³

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Lebih lanjut, G8 mengharapkan pemerintah Iran menuruti kewajibannya sesuai Perjanjian Non Proliferasi (*Treaty Non Proliferation*) senjata nuklir dan menerima kehadiran tim inspeksi senjata PBB tanpa syarat apapun. Seperti diketahui saat ini Iran mengembangkan program penelitian nuklir termasuk pengembangan uranium, tetapi Iran menolak dilakukannya pencarian senjata nuklir.

Negara Kelompok Delapan yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Kanada dan Jepang juga menyetujui rencana untuk menjaga bahan radioaktif jatuh agar tidak jatuh ke tangan para teroris. Lokasi bahan radioaktif tersebut juga akan dijaga ketat dan diberlakukan pembatasan ekspor agar dapat dikontrol secara efektif. Kelompok G8 ini juga berencana akan membentuk badan mengangkal serangan terorisime agar negaranya aman dan memperkuat pertahanannya.

Sejak Iran mengumumkan keberhasilannya menguasai teknologi nuklir, kebijakan Barat dalam mencegah dan mengukung proyek nuklir Iran memasuki tahap baru. Untuk ini, Barat telah mempersiapkan tiga tahap, yaitu, penangguhan, penghentian dan pemusnahan. Dalam melaksanakan rencana ini AS masuk ke medan dengan memerankan polisi jahat sementara Eropa masuk dengan perannya sebagai pihak yang ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Dengan cara ini Barat membuka front melawan proyek nuklir Iran. AS menjadikan pelimpahan isu nuklir Iran ke meja Dewan Keamanan PBB sebagai langkah akhir, sementara Eropa memilih cara untuk bermain tahap demi tahap.

Dengan kata lain, mempertahankan penangguhan seluruh aktivitas nuklir sama akan berakhir dengan kegagalan Iran memperoleh teknologi nuklir yang sudah menjadi hak negara ini. Dalam kondisi seperti inilah, Republik Islam Iran mengubah pola permainan dengan pertama-tama membuka segel instalasi UCF di Isfahan. Langkah berikutnya adalah memulai kembali riset nuklir dan langkah ketiga membatalkan pelaksanaan isu protokol tambahan yang sebelumnya dilakukan secara sukarela. Sejurus kemudian Presiden Republik Islam Iran mengeluarkan instruksi untuk memulai kembali seluruh aktivitas yang berkenaan dengan program nuklir.

Negara-negara Eropa menghentikan perundingannya dengan Teheran dan mengadakan sidang darurat Dewan Gubernur lalu mengeluarkan resolusi bernada keras terhadap Iran. Namun keteguhan bangsa Iran di hadapan tekanan Barat akhirnya membuat Barat mengurangi tuntutan terhadap Iran. Melihat keteguhan Republik Islam Iran dan ketidakpedulian Iran terhadap langkah Barat menyerahkan dokumen nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB membuat Barat terpaksa mengambil langkah mundur, yaitu mengakui hak Iran dalam membangun instalasi untuk memperkaya uranium (UCF) di Isfahan dan memproduksi uranium hexafluoride. Namun, mereka menetapkan syarat agar proses itu dilakukan di luar wilayah Iran.

Tidak diragukan lagi, melalui cara apapun, baik melalui Dewan Keamanan PBB atau cara-cara lain, Barat tidak berhasil menekan Iran agar menghentikan proyek nuklirnya. Para pengamat dan analis Barat banyak yang menilai bahwa serangan militer, embargo ekonomi, atau penyerahan dokumen nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB tidak akan bisa menyelesaikan

permasalahan nuklir Iran. Mereka bahkan berpendapat bahwa Republik Islam Iran yang didukung oleh kekuatan militer yang tangguh, dukungan rakyat, sumber daya alam, dan posisi strategis di Timur Tengah, telah menjadi sebuah kekuatan yang tidak akan bisa ditaklukkan dengan serangan militer.

Selain itu, para pengamat dan analisis politik juga memperingatkan pemerintah negara-negara Barat bahwa langkah-langkah anti Iran, seperti embargo ekonomi atau serangan militer, akan menimbulkan dampak yang sangat dahsyat di dunia. Mereka menyimpulkan bahwa bagi bangsa Iran, masalah nuklir telah menjadi sebuah masalah yang berkaitan dengan harga diri bangsa dan bangsa Iran tidak akan mundur satu langkahpun dari tekadnya untuk menguasai teknologi nuklir.

Teheran melakukan perubahan yang signifikan dalam kebijakannya menyangkut program nuklir yaitu dengan melakukan perundingan dengan negara-negara barat. Sebagaimana diungkapkan oleh Ali Shirzadian, juru bicara Badan Tenaga Atom Iran "Iran sepenuhnya memiliki teknologi pengayaan dan oleh karenanya akan berada di meja perundingan dengan kuat, jika perundingan itu gagal, katanya, Iran akan menulis surat kepada Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA) Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Iran akan bertindak sendiri untuk memasok bahan bakar itu untuk pembangkit Teheran.¹⁴

Presiden Iran MahmoudAhmadinejad menyatakan bahwa perundingan dengan kekuatan dunia pada 19 Oktober di Vienna mengenai program nuklirnya merupakan ujian untuk keberhasilan kerja sama dengan Barat di

¹⁴ Ali Shirzadian. Ancaman Iran Jika Perundingan Nuklir Gagal, diakses pada tanggal 11 Oktober 2009 tersedia dalam <http://www.kompas.com>.

masa depan. Kegagalan pertemuan itu dan pemberlakuan berbagai sanksi terhadap Iran akan lebih melukai Barat daripada Iran. Selain itu Ahmadinejad memandang tak ada halangan lagi untuk melanjutkan diskusi dengan kekuatan dunia.¹⁵

E. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa perubahan sikap Iran dalam pengembangan nuklir dari non kompromis menjadi bersedia untuk melakukan perundingan dengan negara-negara Barat terutama dipengaruhi oleh tekanan yang secara terus menerus dari dunia internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi permasalahan penentangan program nuklir Iran dan upaya-upaya bagaimana Iran mampu mempertahankannya. Rentang waktu atau batasan penelitian adalah dari tahun 2003 ketika Iran mendapatkan tekanan dari negara-negara barat hingga tahun 2009 ketika Iran merubah sikap dari konfrontatif ke kerjasama perundingan dengan negara Barat.

¹⁵ M. Ahmadinejad, Iran setuju perundingan nuklir lebih lanjut, diakses pada tanggal 11 Oktober 2009 tersedia dalam <http://www.kompas.com>.

G. Metode Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka teori dan konsep, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan dengan data-data empiris.

Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, internet dan sumber-sumber lain. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet serta sumbangsih dunia pers yang tehipun lengkap pada koleksi klipng koran yang memuat berita maupun komentar tentang subjek yang penulis pilih.

B. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penulisan, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini menguraikan tentang upaya pengembangan Nuklir Republik Islam Iran meliputi. Republik Islam Iran Sebagai Negara Pengembang Nuklir, Karakter Nasional Republik Islam Iran, Kemampuan Ekonomi Nasional, perkembangan Teknologi Nasional, serta program Pengembangan Nuklir Iran.

BAB III Bab ini menguraikan tentang Dinamika Pengembangan Nuklir Iran, kemandirian Pengelolaan Nuklir Iran, Penerapan Teknologi Mandiri, dan kemandirian Finansial Pembiayaan Nuklir. Negara-negara Pendukung Nuklir Iran, dukungan dari Rusia, dukungan Negara Dunia Ketiga serta membahas perubahan Sikap Nuklir Iran yaitu keikutsertaan Iran dalam Penandatanganan NPT dan perjanjian Iran dan IAEA.

BAB IV Bab ini akan menjabarkan faktor-faktor perubahan sikap Iran dalam upaya mempertahankan program nuklirnya yaitu situasi Politik dalam Negeri , kondisi ekonomi dan militer Iran yaitu keinginan Memiliki Teknologi Nuklir, pengayaan uranium untuk pengembangan tenaga listrik, untuk mengamankan sumberdaya minyak dan lemahnya kekuatan militer. Sedangkan konteks internasional adalah karena meningkatnya Intensitas Tekanan Negara-Negara Barat dan menurunnya kepercayaan dunia Internasional.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.